

Mendiskusikan Pendidikan Kita Menuju Manusia *Kalos Kagathos* Paripurna

Mianto Nugroho Agung

“ ..., Pendidikan tengah diuji untuk mampu memberikan jawaban yang menyulitkan, yakni antara melegitimasi atau melanggengkan sistem dan struktur sosial yang ada, ataupun pendidikan harus berperan kritis dalam melakukan perubahan sosial dan transformasi menuju dunia yang lebih adil”. (Mansour Fakih dalam William F. O’neil, Ideologi-Ideologi Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h.xii)

Dua kutub sulit ‘*melegitimasi atau melanggengkan sistem dan struktur sosial yang ada*’ dan ‘*berperan kritis dalam melakukan perubahan sosial dan transformasi menuju dunia yang lebih adil*’ seperti yang di sodorkan Fakih tersebut menjadi lingkaran benang Mobius yang abadi. Pada yang pertama terkandung anasir ideologi kapitalistik yang konservatif-pragmatis, sementara yang kedua terkandung anasir demokrasi yang kritis-visioner. Keduanya bagai kutub yang disinggahi bandul orientasi rezim dan kecenderungan populis. Pada level menjadi dilema yang kompleks, Fakih menawarkan solusi bernama ‘pemilihan paradigma dan ideologi pendidikan yang mendasarinya’.

Kehadiran Pax Humana Volume III nomor 2 kali ini menyeret roh solutif praktis itu demi mendudukkan keberpihakan kepada kebutuhan nyata masyarakat kontemporer Indonesia. Kebutuhan masyarakat kontemporer Indonesia adalah pemerataan keadilan, keadilan akses ke sumber-sumber hayat, pewujudan kesejahteraan, dan stabilitas aspek-aspek vital negara (ekonomi, keamanan, hukum, dan lebih-lebih politik). Realitas menunjukkan betapa carut marutnya NKRI belakangan ini akibat berbagai instabilitas aspek-aspek vital negara itu.

Maka, jika memilih kutub pertama, yaitu ‘*melegitimasi atau melanggengkan system dan struktur sosial yang ada*’, dengan strategi pembangunan pendidikan (seperti yang ditawarkan Jeane Talakua), Perencanaan dan kebijakan Pariwisata (seperti yang didekati Yerrick Singgalen), model *system thinking* kepemimpinan transformasional (yang diusulkan Ricky Nggili) akan ‘berpotensi’ menjerumuskan murid atau peserta program kepada dunia praktis pragmatis yang dicirikan adanya orientasi yang memusat pada kejayaan diri sendiri, menghalalkan strategi kompetisi yang kotor, pengabaian visi, dan pengutamaan hasil ketimbang cara. Itu artinya ada korban liyan di seberang diri sendiri yakni pengabaian keterpurukan liyan, menafikan strategi kompetisi yang sehat, pengutamaan produk, dan alienasi proses-proses sistematis. Pelanggengan sistem dan struktur sosial merupakan keberpihakan transaksional antara pelaku-pelaku utama pendidikan dan rezim secara dangkal. Orientasi utamanya adalah kesuksesan kini dan sebesar-besarnya. Kalau kesuksesan itu kemudian teraih, maka sudah pasti akan bertumbangan korban berupa: **bencana alam** (kasus bencana

alam di Garut, Indramayu, Pasuruan, Pesisir Pantai Utara Jawa, Gorontalo, Bima adalah akibat 'sukses' perambahan hutan bagi transaksi profit segelintir industriawan/wati), **dekadensi moral** (aksi sadis dan brutal geng motor di berbagai pelosok tanah air; OTT KPK terhadap pelaku korupsi dengan sebaran ragam profesi dari mulai anggota DPR, MK, DPD, hingga karyawan; persekongkolan busuk antara penyelenggara negara dan pengusaha, kriminalitas keji dalam segala bentuk dan aksinya, adalah akibat masyarakat yang disorientasi tokoh panutan dan kurikulum pendidikan yang labil serta tidak dikerjakan oleh profesionalnya), **meningkatnya anomali sosial** (dalam bentuk pengabaian keberagaman menjadi sekadar pengutamaan kepentingan diri atau golongannya, konsumerisme yang superhebat sehingga memboroskan sumberdaya dan ketahanan ekonomi masyarakat, mengendornya lem sosial sehingga terpecah belahlah ikatan-ikatan sosial yang sesungguhnya sangat vital perannya dalam proses penyejahteraan bangsa ini, dan lain-lain), dan **bias-bias politik** (politik dinasti, mobilitas –loncat sana-loncat sini- keanggotaan partai yang terang benderang, kerakusan kekuasaan, dan lain-lain). Alhasil, tawaran Talakua, Singgalen, dan Nggili tersebut harus diimplementasikan dengan menggunakan jawaban Fakih yang kedua, yaitu *'berperan kritis dalam melakukan perubahan sosial dan transformasi menuju dunia yang lebih adil'*.

Sistem dan struktur yang ada bukannya tidak berarti, buruk, dan penuh mudaratnya. Namun, sistem dan struktur yang dilanggengkan akan menjadi ideologis sehingga mustahil mengakomodasi perubahan dan menghargai masukan kritis dan bermanfaat. Apa yang ideologis sesungguhnya sejengkal lagi menjadi idola atau berhala yang –jika salah urus- akan menjadi sesembahan (ilah/tuhan) yang pantas dibela hidup mati pengikutnya. Maka, sejengkal pula demokrasi akan menggali kuburannya sendiri. Realitas dilematis problematik yang digambarkan Zakaria (Bacalah Fareed Zakaria, *Masa depan Kebebasan. Penyimpangan Demokrasi dan Negara Lain*, Jakarta: Ina Publikatama, 2004) tentu patut kita renungkan. Akibat sistem demokrasi yang salah urus menjadikan senjata makan tuan sendiri. Sehingga, peran pertama pendidikan memang tetap dipertahankan sembari dikawal ketat agar tidak mengabdikan buta kepada rezim yang anti perubahan dan pro pemodal jahat belaka.

Reformasi pendidikan dalam rupa studi pendidikan komparatif sejak Perang Dunia II yang berhasil meruntuhkan paham kedaerahan, memperpendek gap/jurang di bidang-bidang strategis, dan pola komunikasi (baca: transfer ilmu, *pen*) yang sangkil dan mangkus (Tuts dan Adams dalam *Pola-pola Pendidikan dalam Masyarakat Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h.1). Hasil terbesar dari reformasi pendidikan dalam bentuk demikian adalah bangkitnya ekspektasi daerah-daerah yang kurang berkembang. Salah satu negara yang berhasil bangkit secara fenomenal itu adalah India, sehingga disebut Thut & Adam sebagai 'Bangsa Baru dan Kebijakan Pendidikan Baru' (2005, h. 621). Beberapa negara lain di Asia juga berhasil maju dan besar (Korea Selatan, Singapura, Jepang, dll) dengan menjalankan program raksasa melalui pintu masuk pendidikan yang transformatif. Beberapa negara berhasil maju karena kebijakan pemodernan bidang kultural: Malaysia dengan semboyan '*trully Asia*', Korea Selatan dengan studi intensif anak bangsanya ke negara-negara maju di bawah panji *Saemaul Undong* (gerakan desa membangun secara gotong royong), Indonesia dengan 'lepas landas'-nya dari negara agraris ke negara industri, dan lain-lain. Meski demikian, yang menjadi tiang besar dari proses modernisasi (juga transformasi) pendidikan dan kemudian menghasilkan masyarakat yang maju dan

sejahtera itu adalah agama.

Pada titik agama hendak dilihat sumbangsuhnya bagi reformasi pendidikan, Handri Yonathan menawarkan resensi buku dengan mengusung judul 'Gereja: Komunitas yang Bersahabat'. Tentu saja dari perspektif iman Kristen. Tapi, tentu saja iman agama lain tak hendak dinafikan dalam forum demokratis ini. Sebab, mendiskusikan pendidikan kita (Indonesia) merupakan forum cair yang lentur mengakomodasi segala bentuk isi diskusi yang ditawarkan. Muara dari diskusi semacam ini paling ideal –jika harus ditentukan- adalah sumbangsih pemikiran produktif-konstruktif: terbentuknya instrumen pendidikan yang memungkinkan menghasilkan manusia melek pendidikan. Manusia yang demikian dalam bahasa Romo Dick Hartoko adalah manusia '*kalos kagathos* (harafiah: indah dan berbudi luhur; jadi: manusia yang mempunyai cita rasa yang halus dan yang berbudi luhur)' (Dick Hartoko dalam *Humaniora Baru*, Basis, Oktober, 1984, XXXII, h.10).

Manusia *kalos kagathos* dewasa ini mesti dibentengi dengan berbagai 'senjata' dan 'pelindung' untuk menjaminkannya terhindar dari gerusan zaman edan ala Ronggowarsito sehingga *kalis* (steril) dan menjadi paripurna. Manusia *kalos kagathos* paripurna inilah yang layak menolong manusia lain melalui pendidikan yang '*berperan kritis dalam melakukan perubahan sosial dan transformasi menuju dunia yang lebih adil*'. Produk perubahan sosial dan transformasi dalam hal ini jelas: DUNIA YANG LEBIH ADIL.

Dunia yang lebih adil mengandaikan berlakunya semua hal secara baik, benar, dan sehat menurut 'rel' dan *rule* yang disepakati, ditetapkan, dan dijunjung tinggi implementasinya. Dunia yang adil bahkan belum terealisasi dan terus diperjuangkan, maka tidak berlebihan jika 'dunia yang lebih adil' itu di mata Baum (George Baum, *Religion and Alienation*, New York: Paulist Press, 1975) dikatakan sebagai utopia. Bukan sekadar utopia, namun utopia yang positif, utopia yang jika dikejar dan dikerjakan secara baik, benar, sehat, dan kerja keras akan tewujud juga. Barangkali, merujuk Popper, itulah Masyarakat Terbuka. Masyarakat yang berhasil meminimalisasi penderitaannya dan memaksimalisasi kebebasan individu (Karl Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-musuhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). Melalui masyarakat terbuka, manusia *kalos kagathos* akan lebih dekat (dan cepat) lagi perwujudannya. Apalagi, jika kita menyimak untaian pemikiran penulis lain di Pax Humana ini: Astrid Bonik Lusi (Tinjauan Kritis tentang Persembahan Berdasarkan Kisah Seorang Janda Miskin dalam Lukas 21:1-4), Valiani Sahara (Strategi 5758 [Maju Mapan] Salatiga dalam Mengatasi Krisis *Corporate Image*), Richard G Mayopu (Investigasi Ringan (Sebuah Analisis Framing terhadap Pemberitaan Program Berita), dan Wilson Therik (Obituari Herman Johannes). Tawaran para penulis di Pax Humana nomor ini jika digerakkan dengan wahana '*berperan kritis dalam melakukan perubahan sosial dan transformasi menuju dunia yang lebih adil*' oleh profesional yang memiliki hati melayani dan berpihak pada rakyat harus diyakini akan membawa damai sejahtera.

Salatiga, November 2016
Mianto Nugroho Agung